

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan penting setiap warga negara saat ini. Bab IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan ikut serta dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat, maka perlu diciptakan pendidikan yang berkualitas. Dengan bantuan pendidikan negara, ia dapat meningkatkan sumber daya manusia, yang mempengaruhi kemajuan di banyak bidang kehidupan lainnya, seperti sosial, ekonomi, politik, dan bidang kehidupan lainnya.

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu untuk bertahan hidup sendiri.¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28C (1) dan Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perkembangan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.

Oleh karena itu, pemerintah harus memenuhi hak setiap warga negara atas layanan pendidikan berdasarkan UUD 1945.² Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses belajar sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif

¹ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006. h., 5.

² Haryono Sudriamunawar, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2002. h., 55.

mengembangkan potensi dirinya dalam kekuatan spiritual keagamaan, disiplin diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan diri, masyarakat, bangsa dan negara keterampilan yang anda butuhkan. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang menyatakan bahwa penyelenggaraan wajib belajar harus pada jalur formal sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar, yaitu SD, MI, SMP, MT dan bentuk serupa lainnya. Oleh karena itu, pendidikan wajib bagi setiap anak. Tidak ada lagi alasan mengapa setiap anak tidak dapat mengenyam pendidikan.

Pendidikan merupakan aspek yang paling penting dalam menyiapkan dan mendidik manusia menjadi manusia yang bertakwa, berakal dan berwatak yang berguna bagi agama dan masyarakat.³ Selain itu, pendidikan juga dapat menyesuaikan masyarakat sehingga ada orang-orang berkualitas di negara tersebut. Pendidikan juga dapat digunakan untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis tetapi juga praktis, manajemen teknologi dan keterampilan khusus. Ini adalah dasar untuk meningkatkan pendidikan negara. Jika melihat minat masyarakat terhadap dunia pendidikan pada saat sekarang ini sangatlah besar. Hanya saja ada beberapa faktor yang membuat masyarakat beserta anak mereka tidak bisa merasakan pendidikan di sekolah. Dari faktor itulah seharusnya pemerintah mencari jalan keluar agar terciptanya pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan yang berlangsung di sekolah disebut pendidikan formal yang artinya terstruktur dan mempunyai jenjang, sedangkan pendidikan berlangsung di tempat-tempat kursus masyarakat dikatakan pendidikan nonformal, dan pendidikan yang dalam keluarga atau di rumah dengan nama pendidikan informal. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah merupakan pendidikan yang formal karena di selenggarakan secara terstruktur dan

³ Haryono Sudriamunawar, *Pengantar Studi Pembangunan*, h., 55.

berjenjang pendidikan dasar. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2003, Pasal 17 berbunyi:

“(1) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi dasar pendidikan menengah. (2) Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sejenis dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sejenis. Menurut ayat 3, peraturan pendidikan dasar yang disebutkan pada ayat 10 dan 2 tetap diatur dengan keputusan pemerintah.⁴

Madrasah merupakan alat atau sarana penunjang pendidikan. Madrasah berasal dari kata *darasa* yang berarti tempat belajar. Dalam konteks Indonesia, istilah madrasah digabung dengan istilah sekolah formal atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Aktifitas madrasah perlu ditunjang alat atau sarana yang menghantarkan materi pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan.

Alat dalam konteks ini dapat mempermudah aktivitas pendidikan dan membantu merealisasikan metode pendidikan.⁵ itulah sebabnya muncul sebuah *adagium usuliah* yang menyebutkan “*al-Umur biwasailiha*”, segala sesuatu perlu di tunjang oleh media atau alat. Dalam al-Qur’an ditemukan pula ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya sarana dan prasarana atau alat-alat dalam pendidikan. Makhluk Allah yang digambarkan dalam Al-Qur’an berupa binatang juga bisa menjadi sarana pendidikan. Firman Allah SWT:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “buatlah srang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang di bikin manusia”, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sistem Pendidikan Nasional, No. 20 Tahun 2003.

⁵ Ahmad Ali Madkur, *Manhaj al-Tarbiyyah fi Tasawwur al-Islami*, (Cet. 1; al-Qahirah: Dar al-Fikr ‘Arabi, 1422 H/2002 M), h., 355.

(bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya. (Q.S. al-Nahl: 68-69).⁶

Menurut *Tafsir Jalalain*, “Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf ‘an dapat diartikan sebagai ‘an *mashdariah* atau ‘an *mufassirah* (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam (dan di pohon-pohon) sebagai tempat tinggal (di tempat-tempat yang dibuat manusia) sarang-sarang buatan manusia untuk kamu (lebah)”.

Ayat di atas menggambarkan peri kehidupan lebah madu secara singkat namun akurat. Dalam konteks pendidikan hal tersebut berkesesuaian dengan sarana atau alat pendidikan. Pepohonan, bukit-bukit merupakan sarana seekor lebah untuk membangun sarangnya sehingga lebah dapat berlindung dan berkembang sesuai kapasitas seekor lebah. Begitu pula sarana pendidikan madrasah merupakan komponen penting untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar belajar siswa.

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersumber dari data Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/*Ministry of Religious Affairs, emis, Odd Semester Data* keberadaan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2021/2022 di Indonesia sebanyak 1711 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 24418 Madrasah Ibtidaiyah swasta dan Jawa Barat memiliki jumlah Madrasah Ibtidaiyah swasta ketiga terbanyak, yakni 4043 Madrasah Ibtidaiyah.

Berikut ini Jumlah Madrasah Ibtidaiyah dan lima Provinsi terbanyak di Indonesia Tahun 2021/2022:

Tabel 1.1 Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Indonesia

⁶ Kementerian Agama RI, Quran dan terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Countess Semarang, 1994

No	Provinsi	Madrasah Ibtidaiyah (Swasta)
1	Jawa Timur	7345
2	Jawa Tengah	4089
3	Jawa Barat	4043
4	Banten	1068
5	Nusa Tenggara Barat	850

Sedangkan data Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Garut berjumlah 324 dan di Kecamatan Tarogong Kaler sebanyak lima lembaga Madrasah Ibtidaiyah swasta. Adapun Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia merupakan salah satu dari lima madrasah baru yang berada di sekitar perumahan desa Mekarwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Berada pada bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Arafah Cendekia yang berafiliasi dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia. Berdiri atas dasar kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar dengan memperhatikan peraturan izin pendirian yang berpedoman terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Sekolah Dasar dan Menengah.⁷

Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia di Kabupaten Garut khususnya masih terdapat kendala dengan berbagai problema dan tantangan baik dalam segi rekrutmen panitia pendirian, pembiayaan pendirian, *focus group discustion* tantangan serta hambatan pendirian, tapi penuh harapan. Hal ini membutuhkan solusi dan partisipasi semua pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada. deskripsi masalah terhadap Madrasah Ibtidaiyah mengisyaratkan perlunya penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah secara terpadu, dimulai dengan

⁷ Kementrian pendidikan dan kebudayaan RI, *Petunjuk pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah*. No 36 tahun 2014.

perencanaan dan pengelolaan. Sehingga peneliti memilih judul “**Manajemen Pendirian Madrasah Ibtidaiyah (Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia Garut)**”.

B. Rumusan masalah

Untuk memberikan arah yang jelas pada masalah penelitian karena latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia?
2. Bagaimana pengorganisasian pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia?
3. Bagaimana pelaksanaan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia?
4. Bagaimana pengawasan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia?
5. Bagaimana dukungan dan hambatan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian dari petunjuk peneliti untuk melakukan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia
2. Pengorganisasian pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia
3. Pelaksanaan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia
4. Pengawasan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia
5. Dukungan dan hambatan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar memeberikan kegunaan yang berarti:

1. Sebagai pengembangan pengetahuan tentang administrasi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya dalam proses izin pendirian.
2. Pertimbangan dan koreksi bagi peneliti terhadap teori fungsi manajemen terhadap administrasi pendirian madrasah/sekolah.
3. Sebagai bahan masukan bagi penggiat pendidikan dalam proses pendirian madrasah sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah dan terencana dengan baik.

E. Kerangka Berpikir

Manajemen berasal dari bahasa latin manus (tangan) dan setuju (melakukan). Digabung menjadi Manajer (Memproses).⁸ Dalam bahasa Inggris, kata kerja untuk mengelola, dengan kata benda administrasi, dan administrator untuk orang yang melakukan tugas administrasi. Sedangkan Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu “manajemen” dan “pendidikan”. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan.⁹ Menurut Pidarta manajemen pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang menggabungkan seluruh elemen pendidikan dengan terfokus untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.¹⁰

Pendidikan agama dalam hal ini agama Islam sebagaimana dijelaskan oleh Zakiyah Darajat adalah pembentukan kepribadian islami atau perubahan sikap dan perilaku sesuai ajaran Islam. Muhammad Qutb, dikutip Abdullah Idi dan Toto Suharto, memaknai pendidikan Islam sebagai upaya menemukan pendekatan holistik terhadap wujud manusia, baik jasmani maupun rohani, melalui kehidupan baik jasmani maupun rohani

⁸ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h., 3.

⁹ Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h., 116.

¹⁰ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 4.

dalam aktivitas di muka bumi.¹¹ Jadi, tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk perilaku muslim (akhlak mulia) dan ketundukan (iman) kepada Allah berdasarkan ajaran Islam (al-Quran dan hadits). Dengan kata lain, tujuan akhir pendidikan Islam adalah ketundukan mutlak kepada Allah pada tingkat individu, sosial dan manusia secara umum.

Secara umum, istilah pendidikan Islam mengacu pada arti dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam kaitannya dengan ajaran Islam. Ada tiga istilah yang biasa digunakan dalam pendidikan Islam yaitu *al-Tarbiyat*, *al-Ta'lim* dan *al-Ta'dib*. *Tarbiyat* berarti memberi makan, memberi makan yang di dalamnya terkandung makna ajaran. Dalam pengertian lain, *tarbiyah* diartikan sebagai proses pengarahan potensi seseorang secara maksimal agar menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan dan masa depan.¹²

Pengelolaan madrasah berikut pendirian perlu menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya. Pendirian madrasah perlu memperhatikan beberapa aspek seperti fungsi manajemen, fungsi manajemen berbicara terkait perencanaan baik rencana pertumbuhan, rencana keuntungan, rencana pemakaiana dan rencana urutan kepegawaian. Selanjutnya setelah mengikuti proses perencanaan dilanjutkan dengan pengorganisasian dengan memperhatikan pekerjaan, pegawai, hubungan-hubungan serta lingkungan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan yang beriringan dengan tahapan-tahapannya. Selain itu, proses pendirian juga perlu diawasi agar proses pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang disepakati.¹³

Ciri utama lembaga pendidikan madrasah adalah menganut nilai-nilai religius. Yang menjadi ciri utama lembaga pendidikan madrasah adalah menganut nilai-nilai religius. seni mengelola, mengatur, dan memajemen sebenarnya setua umur manusia, karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari prinsip manajemen.

¹¹ Zakiah daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h., 28.

¹² Jalaluddin, *Teologi Islam*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h., 67.

¹³ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi* Cet. kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

Baik langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak. Manajemen tidak hanya penting diaplikasikan di perusahaan atau di pemerintahan saja. Manajemen secara umum diperlukan dalam segala bidang, bentuk, organisasi, segala tipe kegiatan. Dimana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan di situ manajemen diperlukan. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengarahan sumber daya untuk mencapai tujuan (objectives) secara efektif dan efisien.¹⁴

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur pemikiran peneliti yang dimaksud dalam menyusun penelitian dengan berbasis pada teori dan konsep. Adapun kerangka berpikir judul penelitian Manajemen Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia Garut menggunakan model CIPP, yaitu:¹⁵

1. *Context*

Hal Ini lebih terkait dengan memberikan informasi untuk menetapkan tujuan yang baik, menciptakan lingkungan yang sesuai dan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Evaluasi konteks juga berfungsi untuk memberikan informasi bagi perumusan “tujuan dan sasaran”. Konteks dimulai dengan analisis konseptual untuk mengidentifikasi dan merumuskan bidang yang akan dievaluasi, dilanjutkan dengan analisis empiris terhadap aspek-aspek yang akan dievaluasi dengan menggunakan survei dan tes. Pada bagian selanjutnya, kedua metode (analisis konseptual dan analisis empiris) dimasukkan untuk menemukan masalah utama dari aspek yang akan dievaluasi.

Penilaian kontekstual yang menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu dilakukan. Penilaian ini mengidentifikasi dan menilai

¹⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h 27.

¹⁵ Muslimin, *Implementasi Continuous Improvement Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru SD IT Mutiara Hati Purwareja Klampok Banjarnegara*, (Purwokerto: Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

kebutuhan yang mendasari program. Penilaian kontekstual adalah situasi atau latar belakang yang mempengaruhi sifat tujuan dan strategi pendidikan. Evaluasi input atau output untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan. Penilaian ini mengidentifikasi manfaat, masalah, dan peluang untuk membantu pengambil keputusan menentukan tujuan dan prioritas, dan untuk membantu komunitas pengguna yang lebih luas mengevaluasi tujuan, prioritas, dan manfaat program, mengevaluasi pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana tenaga kerja, dan target anggaran.

Penilaian kontekstual adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel, dan tujuan proyek. Yang dimaksud dalam hal ini adalah manajemen pendidikan islam sejalan dengan Peraturan Pemerintah Direktur Jenderal Pendidikan Islam RI yang menjelaskan Pedoman Teknis Pembangunan Madrasah No. 1385 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.

2. *Input*

Tujuan utama evaluasi input adalah untuk menentukan bagaimana input digunakan untuk mencapai tujuan program. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk mendapatkan masukan (orang dan entitas) yang valid dan bermanfaat dalam pelaksanaan program pelatihan. Dalam hal ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia sebagai input yang akan dikaji terkait pendiriannya.

3. *Process*

Tujuan dari proses tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah program telah dilaksanakan. Penilaian ini memberikan akses ke implementasi rencana untuk membantu staf program melaksanakan kegiatan dan kemudian membantu komunitas pengguna yang lebih luas untuk mengevaluasi program dan menginterpretasikan manfaatnya. Prosesnya dibandingkan dengan

mesin yang mengubah bahan mentah menjadi keadaan matang. Evaluasi proses dalam model CIPP mengacu pada kegiatan “mana” yang dilakukan dalam program, “siapa” penanggung jawab program, “kapan” kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses didasarkan pada sejauh mana inisiatif yang diterapkan dalam program dilaksanakan sesuai rencana. Pertanyaan dari proses tersebut adalah

- 1) Apakah pelaksanaan program sesuai jadwal?
- 2) Apakah personil yang terlibat dalam pelaksanaan program mampu mengelola kegiatan selama program berlangsung dan mungkin selama program berlangsung?
- 3) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara optimal?
- 4) Kendala apa yang Anda temui dalam pelaksanaan program dan apa peluang untuk melanjutkan program?

Tujuan dari evaluasi proses adalah untuk memberikan umpan balik secara berkala atas pelaksanaan program. Selain itu, ia harus memverifikasi prosedur dan rencana yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan untuk mendeteksi atau memprediksi apapun yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program. Dan secara umum mampu mengidentifikasi atau mengontrol apa yang terjadi, mengapa terjadi, komponen apa yang tidak berfungsi, bidang apa yang kurang aktif atau hambatan apa yang umum dan perlu diatasi. Proses yang dimaksud adalah pisau analisis untuk membedah pendirian Madrasah Ibtidaiyah yaitu dengan menggunakan fungsi manajemen menurut George R. Terry (*Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*)

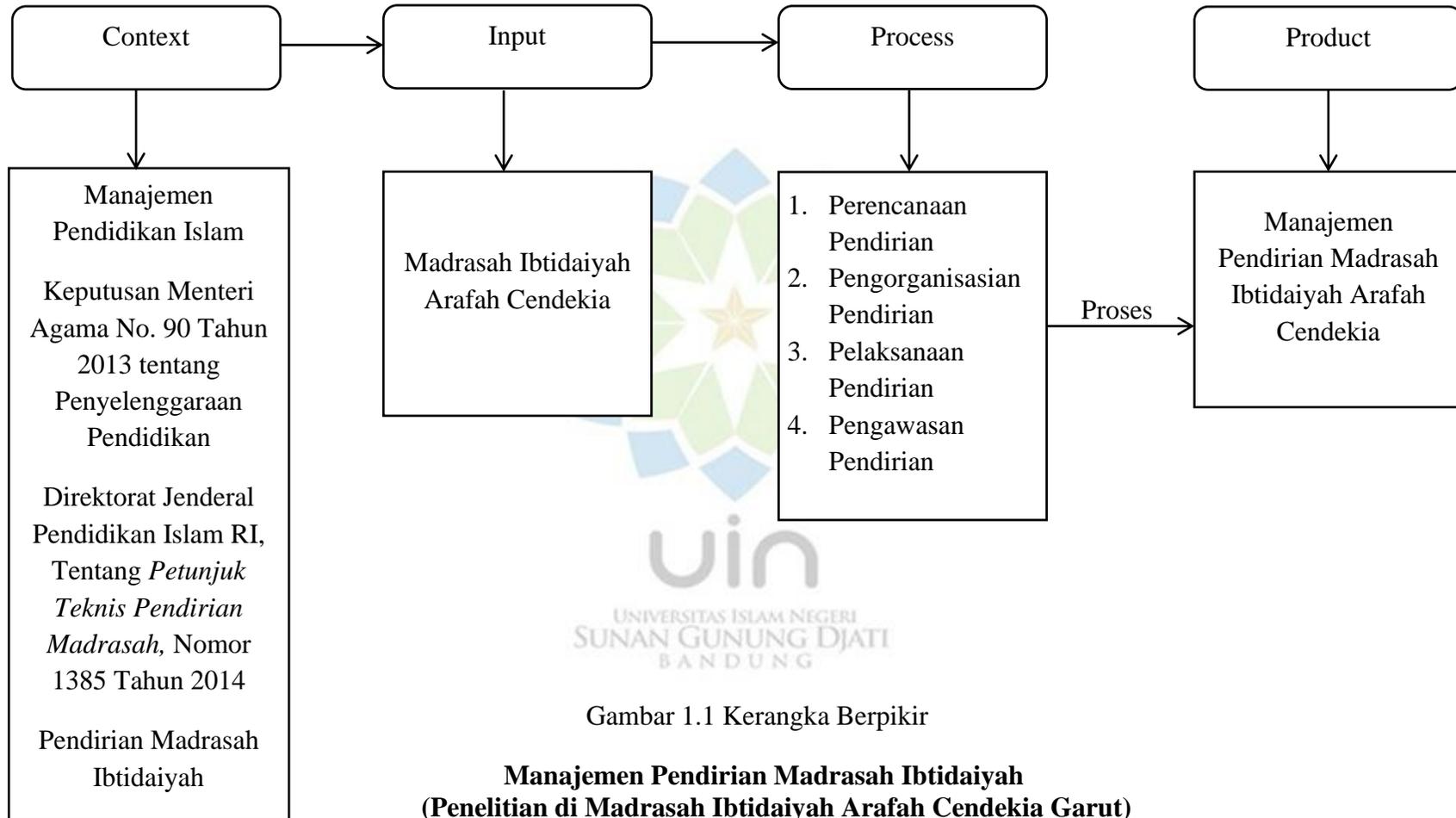
4. *Product*

Produk diimplementasikan pada akhir program atau kegiatan. Berdasarkan standar dan kriteria tertentu produk diarahkan pada masukan mentah. Tujuan evaluasi produk adalah untuk mencari jawaban, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencapai

hasil dan manfaat, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ini juga membantu karyawan fokus pada pencapaian manfaat utama dan pada akhirnya membantu kelompok pengguna yang lebih luas mengukur keberhasilan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.¹⁶ *Outputnya* bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi, yang dimaksud dari *product* diatas yaitu Manajemen Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia Garut



¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, h., 49.



F. Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk lebih memperdalam kajian mengenai manajemen pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arafah Cendekia, Beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini ditinjau, yaitu:

1. Fitrah Nabial Dista (2020)

Pengelolaan Fasilitas TK (Studi Kasus di TK Fastrack Funschool Yogyakarta)
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha Vol 8.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pendirian Fastrack Funschool TK berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu. a) disiapkan berkas pendirian yang kemudian dikirimkan kepada kepala dinas sekolah kabupaten, b) berkas-berkas tersebut diperiksa bersama camat di dinas sekolah kabupaten. mempresentasikan pedagogi taman kanak-kanak kepada kepala dinas sekolah kabupaten/kota, c) menyampaikan rekomendasi permohonan pendirian TK kepada ketua dewan sekolah kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan, untuk mempersoalkan TK tersebut lebih lanjut, d) berdasarkan hasil Setelah dilakukan peninjauan, Kodya/dewan sekolah memutuskan pendirian TK dan pengesahan pelaksanaannya sesuai dengan keputusan kepala dinas (SK) atas nama kepala daerah. Rangkaian tahapan diakhiri dengan berdirinya Fastrack Funschool pada 26 Juni 2010.

Pada hakikatnya penelitian diatas sama-sama berbicara tentang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pendirian lembaga pendidikan. Penelitian yang menyajikan tentang manajemen pendirian TK di bawah Kementerian Pendidikan RI. Studi yang dilakukan oleh peneliti terkait manajemen pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang berada dibawah naungan Dinas Kementrian Agama Republik Indonesia.

2. Regina Sipayung (2021)

SEJ (School Education Journal) Vol. 11, Analisis Kebijakan Pendirian Sekolah Dasar di Kabupaten Batu Bara.

Faktor-faktor proses pelaksanaan kebijakan pembentukan satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut: a) komunikasi adalah faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan terpadu di pendidikan dasar dan menengah, sosialisasi. b) sumber daya, sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakini bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, c) tata tertib, pelaksanaan kebijakan dinas pendidikan batubara harus diperbaiki, d) struktur birokrasi, prosedur operasi standar. Dinas Pendidikan tidak sepenuhnya mengacu pada Kepmendikna Nomor 060/U/2002, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan. Analisis kebijakan pendirian membicarakan tentang bagaimana penelitian

pendirian Sekolah Dasar apakah sesuai dengan teori perencanaan, sedangkan manajemen pendirian Madrasah Ibtidaiyah membicarakan tentang penerapan teori manajemen sebagai pisau analisis untuk menghasilkan pendirian yang teratur sehingga menjadi pedoman yang sesuai.

3. Mutia Ulfa (2020)

LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 1, Analisis Perencanaan Manajemen Pengelolaan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini.

Menurut penelitiannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62 (1) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal atau nonformal yang didirikan harus mendapat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Menurut peraturan tersebut, pendirian lembaga pendidikan anak usia dini harus memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur pendirian yang ditetapkan untuk mendapatkan izin menetap. Setelah lembaga PAUD mendapat persetujuan, maka persetujuan yang diperoleh dapat digunakan untuk memperoleh legalitas atau pengesahan. Legitimasi yang dimaksud adalah legitimasi keberadaan lembaga PAUD sebagai bagian dari proses administrasi dan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan PAUD. Untuk dapat melaksanakan tahapan proses yayasan PAUD secara efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan Yayasan PAUD.

Penelitian dimaksud ruang lingkupnya sedikit hanya berbicara tentang perencanaan, sedangkan penelitian manajemen pendirian Madrasah Ibtidaiyah mencakup semua fungsi manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.



4. Dody Setyawan (2021)

Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9, Formulasi Kebijakan: Tahap Agenda Setting Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu.

Penelitian ini berisi tentang; Berdasarkan analisis perencanaan kebijakan, terdapat kebutuhan untuk membangun infrastruktur SMA Negeri khususnya di zona zonasi. Rencana tersebut mempertimbangkan daya tampung sekolah, kemampuan siswa SD untuk masuk ke SMP, dan faktor penentunya adalah zonasi dan penataan HMV Kota Batu serta keberadaan SMP antar wilayah, menambah jumlah sekolah. siswa SMP di Kota Batu.

Penelitian yang dimaksud diatas berbicara tentang tahap setting pembangunan SMP dengan melihat situasi kondisi lingkungan sekitar, sedangkan manajemen

pendirian Madrasah Ibtidaiyah mencakup tentang seluruh aspek *input* dan *output* terkait dengan aturan pendirian dan kondisi lingkungan tempat pendirian.

5. Rosmaya (2019)

Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9, Pengurusan Perizinan Sekolah Filial oleh Kementerian Pendidikan di Kota Padang.

Kajian ini mencakup “Sekolah anak yang sejatinya merupakan sekolah layanan khusus yang juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Budaya. Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Undang-Undang Dasar dan Satuan Pendidikan Dasar Tahun 2003 Persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan No. 20 meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan guru, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem penilaian dan sertifikasi serta proses manajemen dan pelatihan.

Penelitian lebih terfokus terhadap pengurusan izin pendirian, berbeda dengan penelitian pendirian Madrasah Ibtidaiyah berfokus terhadap seluruh aspek pendirian.

6. Sartika, Wahyuni Iskandar, Fatahullah, (2021)

Jurnal KOPEMAS Vol. 2, Pendirian Sekolah Anak Gembala Sebagai Senjata Mewujudkan Generasi Melek Aksara di Desa Tuju Kabupaten Jeneponto.

Dalam penelitiannya “Hasil review dan evaluasi menunjukkan bahwa peranserta masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Anak Gembala untuk menunjang kampung Desa Tuju sebagai kampung Literasi. Hal ini ditunjukkan dari pendapat responden yang menyatakan bahwa masyarakat berperan (53,3%) dan sangat berperan (40%) di dalam peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Anak Gembala untuk menunjang kampung literasi. Responden juga berpendapat bahwa untuk operasional Pendidikan Sekolah Anak Gembala membutuhkan biaya operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kuisioner dimana 36,7% responden berpendapat bahwa biaya sangat dibutuhkan dan yang lain 63,3% berpendapat biaya dibutuhkan untuk operasional sekolah anak gembala. Keadaan ini mengubah paradigma bahwa penyelenggara lembaga pendidikan tidak membutuhkan biaya”.

Penelitian diatas terkait pertimbangan pendirian Sekolah Anak Gembala untuk mewujudkan minat baca anak, manajemen pendirian madrasah berbicara tentang secara keseluruhan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan Indonesia sehingga

memperhatikan pendirian madrasah sebagai fasilitator mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia.

7. Usep Suhud, Sri Zulaihati, Indra Pahala (2017)

Jurnal Sarwahita Vol. 14 No. 01, Pendirian rumah baca dan pelatihan soft skill bagi guru sekolah dasar di Desa Madobak dan Desa Muara Siberut Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitiannya menyebutkan “Pendirian Rumah Baca perlu memperhatikan segala aspek diantaranya, legalitas dari instansi terkait, letak geografis wilayah, *culture lag*, sarana, SDM dan sebagainya.

Penelitian diatas terkait Pendirian taman bacaan dan pelatihan *soft skill* bagi para guru, manajemen pendirian madrasah berbicara tentang standar proses berdirinya sebuah lembaga pendidikan mencakup pembangunan secara fisik dan *softskill* secara pengembangan Sumber Daya Manusia.

7. Prima Aswirna, Reza Fahmi (2014)

Studi deskriptif tentang pendirian sekolah LABOR (LABSCHOOL) dengan analisis SWOT.

Menurut hasil penelitiannya, “faktor kekuatan-kelemahan (strength-weakness) memiliki hubungan dengan faktor peluang-tantangan (opportunity-threat) dalam pendirian sekolah Labor (Labschool) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Insitut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang terdapat proses pendirian Sekolah LABOR, baik dari segi legalitas sarana prasarana dan lain sebagainya.

Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah secara umum pertimbangan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu, legalitas dari instansi terkait, letak geografis wilayah, *culture lag*, sarana, SDM dan sebagainya. Secara perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penilitian terbaru ini, peneliti lebih memfokuskan identifikasi pendirian lembaga pendidikan ini berbasis Islami (madrasah).